

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Isu maritim pada dasarnya bukanlah suatu yang baru bagi Indonesia karena isu maritime selalu ada dalam setiap kebijakan presiden Indonesia, mulai dari Presiden pertama Soekarno hingga presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi dari enam presiden tersebut, tidak ada satupun yang menjadikan isu maritim sebagai visi utama pemerintahannya. Hal ini berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi), sebagai presiden terpilih ketujuh Indonesia tahun 2014, sebagian besar fokus kebijakannya lebih ke arah menjadikan isu maritim sebagai kebijakan utama dalam pemerintahannya. Salah satu hal yang paling menonjol tentang keseriusan Jokowi terkait kebijakan maritim ialah melakukan pidato kemenangan sebagai presiden terpilih Indonesia di atas kapal Pinisi, pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan yang mempunyai sejarah yang panjang di Pulau Jawa dan perairan Indonesia, sedangkan kapal Pinisi ialah sebagai simbolis keseriusan Jokowi untuk mengembalikan semangat Indonesia serta menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara Poros Maritim Dunia.¹

¹ <https://www.merdeka.com/politik/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-atas-kapal-pinisi.html> 28-4-2019 pukul 13.39 WIB.

Presiden Jokowi telah menjadikan salah satu janji politik dalam terpilihnya sebagai Presiden tahun 2014-2019 yaitu menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara Poros Maritim Dunia. Hal ini telah ditegaskan dengan sebuah konsep Indonesia sebagai sebuah negara maritim oleh Jokowi dalam pidatonya ketika Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 *East Asia Summit* pada tanggal 13 November 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar, dengan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 pilar utama, yaitu: (1) membangun kembali budaya maritim di Indonesia, (2) menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan mengutamakan nelayan pada pilar utama, (3) memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan cara membangun tol laut, *deep seaport*, *logistic industry* perkapalan, dan pariwisata maritim, (4) menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerjasama dan upaya menangani sumber konflik di bidang maritim, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penegasan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa-negara dan bukan memisahkan, (5) membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.²

Selain dari konsep 5 pilar tersebut disampaikan, keseriusan Jokowi dalam menjadikan Indonesia negara maritim juga bisa pada saat Jokowi menyampaikan

² <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx> 28-4-2019 pukul 11.52 WIB.

pidato kenegaraan pada HUT RI ke-70 di gedung MPR, Senayan, Jakarta, yaitu sebagai berikut:

“ ... Seiring dengan itu, kita juga harus menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim. Bangsa yang menjaga dan mendayagunakan lautnya dengan penuh kesungguhan.

Itulah bagian awal dari upaya kita untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim yang tidak saja digagas untuk menciptakan ketahanan nasional tetapi juga ketahanan regional dan global. Strategi inilah yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia ...”³

Isu kemaritiman dijadikan Jokowi sebagai nawa cita dalam 5 tahun kepemimpinannya. Melihat dari konsep 5 pilar pada poin ke-4 yang berbunyi “menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerjasama dan upaya menangani sumber konflik di bidang maritim, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penegasan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa-negara dan bukan memisahkan”, Indonesia untuk menjadikan negara poros maritim dunia juga mencanangkan

³ <https://setkab.go.id/pidato-kenegaraan-presiden-republik-indonesia-dalam-rangka-hut-ke-70-proklamasi-kemerdekaan-republik-indonesia-di-depan-sidang-bersama-dpr-ri-dan-dpd-ri-jakarta-14-agustus-2015/> 29-4-2019 pukul 07.38 WIB.

melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mempercepat pembangunan negara yang dituju untuk dilakukan kerjasama dalam bidang maritim ialah Jepang, sebagai salah satu negara yang maju dalam bidang maritim.

Indonesia pernah dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun dan berhenti pada tanggal 14 Agustus 1945 ditandai Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia II.⁴ Namun itu hanya sebatas sejarah, karena kedepannya Indonesia menjadi negara merdeka dan bisa melakukan kerjasama ke berbagai negara, tak terkecuali kepada Jepang. Letak geografis antara Indonesia dan Jepang memang tidak dekat atau bukan negara tetangga, tetapi mempunyai kesamaan yaitu negara maritim. Hal ini menjadikan kedua negara sangat penting dalam menjalin hubungan bilateral. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang dimulai sejak terbentuknya perjanjian Perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang pada bulan April 1958. Hingga saat ini hubungan Indonesia dan Jepang telah berkembang secara signifikan melalui kerjasama yang dilakukan di berbagai bidang.⁵

Sejak tahun 2015 hingga 2018, Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang cukup erat, terutama dalam bidang maritim. Dewasa ini, Indonesia dan Jepang sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang maritim yang diwadahi dalam *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF). Kerja sama antara Indonesia dan Jepang tersebut atas dasar inisiatif dari Indonesia. Adanya kesadaran Indonesia akan potensi

⁴ Aswab Nanda Pratama, Hari Ini dalam Sejarah: Jepang Menyerah dan Perang Dunia II Berakhir, diakses dalam <https://internasional.kompas.com/read/2018/08/14/11071931/hari-ini-dalam-sejarah-jepang-menyerah-dan-perang-dunia-ii-berakhir> pada tanggal 8-4-2019 pukul 19.39 WIB.

⁵ KBRI Tokyo, diakses dalam <https://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx> pada tanggal 8-4-2019 pukul 19.45 WIB.

maritim yang harus dilindungi sehingga, Indonesia mengajak Jepang untuk bekerjasama dalam bidang maritim.⁶

Awal terjadi inisiatif Indonesia mengajak kerja sama maritim dengan Jepang ialah ketika Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), melakukan agenda kunjungan ke Jepang dan Tiongkok selama tujuh hari. Tepatnya pada 22 Maret 2015 Presiden Jokowi tiba di Jepang dan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, untuk melakukan hubungan bilateral besoknya.⁷ Pada pertemuan ini Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Shinzo Abe menyepakati untuk kedua negara melakukan kerja sama dari berbagai hal, mulai dari industri, ekonomi, pertahanan, transportasi, hingga maritim.⁸

Lalu pada hari rabu tanggal 20-21 Desember 2016, Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan membahas kerja sama di bidang maritim yang bersifat strategis bagi kedua negara. Indonesia dengan diwakilkan oleh Menko Maritim, Luhut Panjaitan, bertemu dengan Menlu Jepang Fumio Kishida. Mereka sepakat membentuk *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF) dengan mentandatangani *Memorandum of Cooperation to Establish Indonesia-Japan Maritime Forum*. Menko Luhut mengatakan, IJMF akan menjadi forum penting bagi Indonesia dan Jepang

⁶ Riana Citra Fitri Mardiana, Indonesia dan Jepang Sepakat Bentuk IJMF, diakses di <https://www.jitunews.com/read/49665/indonesia-dan-jepang-sepakat-bentuk-ijmf> pada tanggal 8-4-2019 pukul 20.14 WIB.

⁷ Sabrina Asril, Tinggalkan Indonesia, Jokowi Mulai Kunjungan ke Jepang dan Tiongkok, diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/22/13270511/Tinggalkan.Indonesia.Jokowi.Mulai.Kunjungan.ke.Jepang.dan.Tiongkok> pada tanggal 10-4-2019 pukul 10.04 WIB.

⁸ Humas, Disambut Udara Dingin, Presiden Jokowi Tiba di Tokyo Untuk Kunjungan Kenegaraan, diakses dalam <https://setkab.go.id/disambut-udara-dingin-presiden-jokowi-tiba-di-tokyo-untuk-kunjungan-kenegaraan/> pada tanggal 10-4-2019 pukul 10.25 WIB.

untuk membangun berbagai kerja sama konkrit kemaritiman kedua negara dalam rangka memberikan sumbangan nyata bagi upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Adapun IJMF ini mencakup bidang keselamatan laut dan keamanan maritim, pembangunan infrastruktur kemaritiman, pembangunan ekonomi kemaritiman, dan pendidikan dan pelatihan kemaritiman.⁹

Dalam isi perjanjian IJMF, pembahasan yang menjadi topik utama adalah bidang maritim. Kerjasama antara kedua negara ini sangatlah penting karena dengan demikian Indonesia dapat mengelola dan memanfaatkan potensi maritim dengan lebih baik dan saling memperoleh keuntungan komperatif dengan Jepang. Bagi penulis, kerjasama Indonesia dan Jepang ini sangat menarik untuk dikaji melihat kepentingan Indonesia dalam kerjasama bidang maritim dengan Jepang yang merupakan salah satu negara yang bagus dan maju dalam mengelola sektor maritimnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, rumusan masalah yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana kepentingan Indonesia melakukan kerja sama dengan Jepang dalam *Indonesia-Japan Maritime Forum* tahun 2016-2018?”

⁹ Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, diakses dalam <https://maritim.go.id/indonesia-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum/> pada tanggal 9-4-2019 pukul 14.15 WIB.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kepentingan Indonesia melakukan kerjasama bidang maritim dengan Jepang dalam *Indonesian-Jepang Maritime Forum* tahun 2016-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan bagi pegiat pengembangan pengetahuan Ilmu Hubungan Internasional, dan juga dapat sebagai referensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang melakukan kajian tentang kerjasama dua negara atau kajian tentang kepentingan nasional suatu negara, khususnya Indonesia dan Jepang, baik kerjasama di bidang maritim hingga kerjasama bidang lainnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai penambah pengetahuan bagi pembacanya khususnya di bidang kerjasama negara dalam bidang maritim.

1.5. Penelitian Terdahulu

Guna membantu proses penyelesaian penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa rujukan dari peneliti sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian penulis saat ini. Berikut beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai rujukan

dalam tulisan penulis. *Pertama*, “**Kerja Sama Indonesia-Australia Bidang Maritim (*Maritime Cooperation*) Tahun 2017-2018**” yang ditulis Rahmania Kamarudin, dari Universitas Muhammadiyah Malang.¹⁰ Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kerja sama Indonesia dan Australia di bidang maritim khususnya di bidang keamanan kedua negara yang saling bertetangga ini dari segala kejahatan transnasional di daerah perbatasan dan kerjasama tersebut di namai dengan *Maritime Cooperation*, serta dalam penelitian tersebut mempunyai batas waktu dari 2017 awal dari perjanjian kerjasama dibuat hingga tahun 2018. Penelitian ini menggunakan konsep kerjasama internasional karena fokus penelitiannya membahas kerjasama Indonesia dan Australia dan konsep Keamanan Maritim karena fokus kerjasamanya yaitu kerjasama dalam keamanan maritim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan menggunakan teknik analisa kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berfokus pada kerjasama di bidang maritim dan di inisiasi pertama kali oleh Indonesia, dan juga fokus penelitian samasama di kerjasama di bidang maritim. Perbedaannya terletak pada negara yang bekerjasama dan fokus dari kerjasama, yaitu penelitian ini memfokuskan kerjasama Indonesia dan Australia di bidang keamanan maritim, sedangkan penelitian penulis yaitu kepentingan Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan Jepang dalam pembangunan maritim.

Kedua, “**Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Tiongkok Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Era Joko Widodo**” yang ditulis oleh

¹⁰ Rahmania Kamarudin, 2019, *Kerja Sama Indonesia-Australia Bidang Maritim (*Maritime Cooperation*) Tahun 2017-2018*, Malang, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

Selly Lidiana.¹¹ Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kepentingan Indonesia melakukan kerjasama dengan Tiongkok di bidang pembangunan pelabuhan era Presiden Joko Widodo. Indonesia berinisiatif melakukan kerjasama dengan Tiongkok karena Indonesia di Era Joko Widodo mempunyai visi misi menjadikan Indonesia negara poros maritim dunia dan salah satu caranya yaitu melakukan kerjasama dengan negara yang dianggap lebih maju dari Indonesia, salah satunya Tiongkok. Dalam isi dari penelitian tersebut dijelaskan tentang kepentingan Indonesia dalam meningkatkan keamanan dan pertahanan Indonesia (*core values*), meningkatkan Ekonomi (*middle-range objective*), dan kepentingan dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia (*long-range objective*). Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional karena fokus penelitian ini membahas kepentingan Indonesia dan konsep kerjasama bilateral karena penelitian ini membahas tentang kerjasama dua negara yaitu Indonesia dan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dan teknik analisa kualitatif. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas kerjasama dua negara dan berfokus pada kepentingan nasional Indonesia dan dalam hal kerjasama ini sama-sama diinisiasi oleh Indonesia. Perbedaan penelitian ini yaitu berbeda pada negara yang dituju Indonesia dalam melakukan kerjasama.

Ketiga, “Kerjasama Ekonomi Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa) Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Industri Di

¹¹ Selly Lidiana, 2018, *Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Tiongkok Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Era Joko Widodo*, Malang, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

Indonesia” yang ditulis oleh Harry Bahtiar.¹² Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan juga meneliti tentang implikasinya terhadap pertumbuhan industri setelah terjadinya kesepakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif kedua negara bekerjasama dalam bidang ekonomi, mengetahui keuntungan dan manfaat kedua belah pihak khususnya Indonesia, dan juga mengetahui sejauhmana perkembangan industry di Indonesia pasca kerjasama terjadi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, tingkat analisa korelasional, dan konsep kerjasama bilateral. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah Indonesia sama-sama melakukan kerjasama dengan Jepang demi mewujudkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada bidang kerjasama yang dilakukan.

Keempat, “Kerjasama Ekonomi Indonesia-Jepang Dalam Bidang Ekspor Non-Migas Indonesia ke Jepang Pada Komoditas Pertanian (2011 – 2015)” yang ditulis oleh Alfi Fauziah.¹³ Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana kerjasama ekonomi yang dilakukan Indonesia dan Jepang dalam bidang non-migas khususnya pada komoditas pertanian. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui kepentingan nasional masing-masing negara dalam melakukan kerjasama di sektor pertanian, perkembangan ekspor dari Indonesia ke Jepang, dan mengetahui hambatan-hambatan

¹² Harry Bahtiar, 2016, *Kerjasama Ekonomi Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa) Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Industri Di Indonesia*, Universitas Pasundan, diakses dalam <http://repository.unpas.ac.id/12834/> pada tanggal 4-5-2019 pukul 05.21 WIB.

¹³ Alfi Fauziah, *Kerjasama Ekonomi Indonesia – Jepang Dalam Bidang Ekspor Non-Migas Indonesia Ke Jepang Pada Komoditas Pertanian (2011 – 2015)*, Universitas Pasundan, diakses dalam <http://repository.unpas.ac.id/3214/> pada tanggal 4-5-2019 pukul 05.58 WIB.

yang dialami pemerintah Indonesia dalam melakukan peningkatan ekspor ke Jepang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, tingkat analisa korelasional, dan menggunakan konsep perdagangan internasional, kerjasama internasional, dan kepentingan nasional. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah Indonesia sama-sama melakukan kerjasama dengan Jepang demi mewujudkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada bidang kerjasama yang dilakukan.

Kelima, “Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia” yang ditulis oleh M. Najeri Al Syahrin.¹⁴ Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana arah kebijakan yang diambil Presiden Jokowi Widodo dalam pemerintahannya menjadikan Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia dan menjelaskan bagaimana strategi yang diambil dalam mewujudkan sinergitas dalam pembangunan ekonomi dan keamanan laut Indonesia, karena pada kenyataannya ekonomi dan keamanan pada dasarnya seperti dua sisi mata uang. Pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas pertahanan dan keamanan, adapun kekuatan pertahanan membutuhkan alokasi anggaran dan kemampuan ekonomi yang mendukung, hal ini lah yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah terletak pada tujuan utama dari proses kedua penelitian yaitu menjadikan

¹⁴ M. Najeri Al Syahrin, *Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, diakses dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiigaLAv4DiAhVNF6wKHQ5SBQsOFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fjournal.undip.ac.id%2Findex.php%2Fip%2Farticle%2Fdownload%2F20175%2F13866&usg=AOvVaw21k5qSLzbVi hYa_1WabG40 pada tanggal 4-5-2019 pukul 06.29 WIB.

Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini lebih membahas kepada arah pembangunan yang dilakukan pihak pemerintah dalam negeri dalam mewujudkan kemajuan ekonomi dan keamanan dalam bidang maritim. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas kepada kerjasama yang dilakukan dengan negara lain dalam mewujudkan pembangunan maritim.

Adapun dalam penelitian yang dikaji penulis pastinya memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasar dengan penelitian-penelitian terdahulu. Posisi penelitian ini yaitu memaparkan tentang kepentingan nasional Indonesia melakukan kerjasama dengan Jepang yang diwadahi dalam *Indonesian-Japan Maritime Forum* (IJMF) sebagai salah satu upaya Indonesia dalam mewujudkan visi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu negara Poros Maritim Dunia. Dalam mengkaji penelitian ini, penulis berfokus menggunakan konsep kepentingan nasional dari K.J. Holsti yang membagi kepentingan nasional negara menjadi tiga hal utama, yaitu *core values*, *middle-range objective*, *long-range objective*. Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi serta menggunakan konsep atau teori untuk menganalisis data dan teknik analisa kualitatif yaitu teknik pengumpulan data-data melalui sumber-sumber terpercaya.

1.5.1. Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul & Nama Peneliti	Jenis Penelitian & Alat Analisa	Hasil
1.	Kerja Sama Indonesia-Australia Bidang Maritim (<i>Maritime Cooperation</i>) Tahun 2017-2018 Oleh : Rahmania Kamarudin, Universitas Muhammadiyah Malang (Skripsi)	Metode Deskriptif, Teknik Analisa Kualitatif, Konsep : Kerjasama Internasional & Keamanan Maritim	Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kerja sama Indonesia dan Australia di bidang maritim khususnya di bidang keamanan kedua negara yang saling bertetangga ini dari segala kejahatan transnasional di daerah perbatasan dan kerjasama tersebut di namai dengan <i>Maritime Cooperation</i> , serta dalam penelitian tersebut mempunyai batas waktu dari 2017 awal dari perjanjian kerjasama dibuat hingga tahun 2018. Kerjasama tersebut merupakan upaya kedua negara dalam menciptakan keamanan maritim dimana hal tersebut bermuara pada terlindungnya sektor ekonomi dan ketahanan masing-masing pihak.
2.	Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Tiongkok Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Era Joko Widodo Oleh : Selly Lidiana, Universitas Muhammadiyah Malang (Skripsi)	Metode Eksplantif, teknik analisa Kualitatif, Konsep : Kepentingan Nasional & Kerjasama Bilateral	Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kepentingan Indonesia melakukan kerjasama dengan Tiongkok di bidang pembangunan pelabuhan era Presiden Joko Widodo. Indonesia berinisiatif melakukan kerjasama dengan Tiongkok karena Indonesia di Era Joko Widodo mempunyai visi misi menjadikan Indonesia negara poros maritim dunia dan salah satu caranya yaitu melakukan kerjasama dengan negara yang dianggap lebih maju dari Indonesia, salah satunya Tiongkok. Dalam isi dari penelitian tersebut dijelaskan tentang kepentingan Indonesia dalam meningkatkan keamanan dan pertahanan Indonesia (<i>core values</i>), meningkatkan Ekonomi (<i>middle-range objective</i>), dan kepentingan dalam menjaga keamanan

			dan perdamaian dunia (<i>long-range objective</i>).
3.	Kerjasama Ekonomi Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa) Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Industri Di Indonesia Oleh : Harry Bahtiar, Universitas Pasundan, Bandung (Skripsi)	Metode Deskriptif, tingkat analisa Korelasionis, Konsep : Kerjasama Bilateral	Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam <i>Indonesia-Japan Economic Patrnership Agreement</i> (IJEPA) dan juga meneliti tentang implikasinya terhadap pertumbuhan industri setelah terjadinya kesepakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif kedua negara bekerjasama dalam bidang ekonomi, mengetahui keuntungan dan manfaat kedua belah pihak khususnya Indonesia, dan juga mengetahui sejauhnmana perkembangan industry di Indonesia pasca kerjasama terjadi.
4.	Kerjasama Ekonomi Indonesia-Jepang Dalam Bidang Ekspor Non-Migas Indonesia ke Jepang Pada Komoditas Pertanian (2011 – 2015) Oleh : Alfi Fauziah, Universitas Pasundan, Bandung (Skripsi)	Metode Deskriptif, tingkt analisa Korelasionis, Konsep: Perdagangan Internasional, Kerjasama Internasional, & Kepentingan Nasional	Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana kerjasama ekonomi yang dilakukan Indonesia dan Jepang dalam bidang non-migas khususnya pada komoditas pertanian. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui kepentingan nasional masing-masing negara dalam melakukan kerjasama di sector pertanian, perkembangan ekspor dari Indonesia ke Jepang, dan mengetahui hambatan-hambatan yang dialami pemerintah Indonesia dalam melakukan peningkatan ekspor ke Jepang.
5.	Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia Oleh : M. Najeri Al Syahrin, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda		Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana arah kebijakan yang diambil Presiden Jokowi Widodo dalam pemerintahannya menjadikan Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia dan menjelaskan bagaiamana strategi yang diambil dalam mewujudkan sinergitas dalam pembangunan ekonomi dan keamanan laut Indonesia, karena pada kenyataannya ekonomi dan keamanan

	(Jurnal)		pada dasarnya seperti dua sisi mata uang. Pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas pertahanan dan keamanan, sedangkan kekuatan pertahanan membutuhkan alokasi anggaran dan kemampuan ekonomi yang mendukung, hal ini lah yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini.
6.	Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Maritim pada <i>Indonesian-Japan Maritime Forum (IJMF)</i> dengan Jepang Oleh : Reza Fahlevi Al Ayubi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang (Skripsi)	Metode Deskriptif, Teknik Analisa Kualitatif, Konsep : Kerjasama Internasional & Kepentingan Nasional	Mengkaji tentang bagaimana kepentingan maritim Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam <i>Indonesian-Japan Maritime Forum (IJMF)</i> yang diinisiasi pertama kali oleh Indonesia dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dari K. J. Holsti yang memaparkan tiga kepentingan suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain yang dianggap mampu mewujudkan kepentingan nasionalnya.

1.6. Landasan Konseptual

Dalam sebuah penelitian, landasan konseptual sangat penting dalam menyelesaikan tulisan secara focus dan sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional.

1.6.1. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu hasil dari kondisi masyarakat yang saling tergantung satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam melakukan kerjasama dibutuhkan suatu wadah atau media yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Suatu hal yang menjadi persamaan

kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat itulah yang menjadi tujuan kerjasama dilakukan. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi beberapa bidang, seperti politik, ekonomi, faktor, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.¹⁵

Menurut Joseph Grieco, seorang ilmuwan hubungan internasional, kerjasama internasional merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan berdasarkan kebijakan negara tersebut, sehingga dengan begitu negara dapat dengan mudah mengatur kebutuhan dan negara dapat memperoleh keuntungan dari kerjasama yang dilakukan. Kerjasama dibedakan menjadi tiga bentuk kerjasama yaitu kerjasama bilateral, kerjasama regional dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Kerjasama yang dilakukan biasanya dalam bentuk hubungan ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Kerjasama regional adalah kerjasama yang terdiri dari beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah yang saling berdekatan. Kerjasama tersebut dilakukan karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi dan pertahanan. Terakhir kerjasama multilateral, adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Biasanya kerjasama ini dilakukan banyak negara yang kemudian membentuk sebuah wadah atau organisasi internasional.¹⁶

¹⁵ Perwita, A.A. Banyu dan Yanyan Mochamad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal. 34.

¹⁶ Drs Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi Dan Teori Hubungan Internasional, Badung, Refika Aditama, hlm 276.

Kerjasama internasional dapat digolongkan menjadi tiga elemen penting yaitu: pertama, tindakan yang dilakukan oleh negara dan aktor non negara, kedua kerjasama dilakukan berdasarkan identifikasi dan komitmen untuk tujuan-tujuan yang akan dicapai, dan ketiga yaitu keuntungan dari hasil kerjasama yang dilakukan. Pertama perilaku setiap aktor negara, diarahkan ke beberapa tujuan. Semua faktor tidak harus memiliki tujuan yang sama tetapi mereka sepihak dalam melakukan kerjasama. Kedua, kerjasama yang dilakukan atas dasar permasalahan yang dihadapi masing-masing negara dengan komitmen bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Ketiga, kerjasama yang dilakukan menyiratkan keuntungan atau imbalan kepada parafaktor. Keuntungan yang didapatkan tidak perlu sama besarnya atau baik untuk setiap negara tetapi kerjasama tersebut saling menguntungkan.¹⁷

Dalam konteks ini, terkait kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang merupakan bentuk kerjasama bilateral karena hanya dilakukan oleh dua negara yakni Indonesia dan Jepang. Kerja sama yang dilakukan merupakan inisiatif dari Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia negara maritim yang besar yang pengawasan dan pengembangannya akan lebih cepat dan efektif bila dilakukan kerjasama dengan negara yang lebih maju seperti Jepang. Kerjasama yang dilakukan tentunya mempunyai dampak yang saling menguntungkan, bukan hanya Indonesia semata. Kerjasama dilakukan Indonesia berdasarkan kebutuhan

¹⁷ Helen Minler, 1992, *International Theories Of Cooperation Among Nations Strengths And Weaknesses*, Cambridge University Press, hlm 467-468.

Indonesia untuk kemajuan negara dalam bidang maritim sesuai dengan visi yang diusung yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

1.6.2. Kepentingan Nasional

Negara menetapkan kepentingan nasional dan bagaimana kepentingan tersebut dapat dicapai adalah dengan cara menggunakan kebijakan nasional yang sudah disepakati. Dalam hal ini, negara memiliki peran sebagai aktor utama yang mengambil keputusan yang akan berperan penting bagi masyarakat dalam negerinya. Kepentingan nasional merupakan salah satu cara untuk mendapatkan suatu kepentingan dengan cara melakukan kerjasama, baik itu kerjasama bilateral maupun multilateral yang sesuai dengan keputusan kebijakan nasional negara. Kepentingan nasional adalah kumpulan tujuan sebuah negara yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan dan cita-citanya untuk melindungi dan mempertahankan identitas negara, ekonomi, politik dan budaya dan lain sebagainya dengan cara melakukan semua kerjasama.¹⁸

Menurut K.J. Holsti kepentingan nasional merupakan suatu gambaran akan peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi yang akan diwujudkan oleh pemerintah melalui pengaruh dari luar negeri dan mendukung sikap dari negara lain. K.J. Holsti menjelaskan bahwa kepentingan nasional sangat berkaitan erat

¹⁸ Arry Bainus & Junita Budi Rachman, 2008, Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional, *Intermestic: Journal of International Studies*, hal. 109, diakses dalam <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjuubfeusrhAhW57XMBHWlrAN8QFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fintermesticjournal.fisip.unpad.ac.id%2Findex.php%2Fintermestic%2Farticle%2Fdownload%2F74%2F34%2F&usg=AOvVaw0Le49qSSsv9Ffd2xZv-L0v> pada tanggal 12-4-2019 pukul 18.39 WIB.

dengan beberapa kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapai melalui kerjasama dengan negara lain. K.J Holsti mengidentifikasikan kepentingan nasional dalam tiga klasifikasi yaitu¹⁹:

1. *Core Values*

Core values merupakan sesuatu yang dianggap penting bagi sebuah negara. Sebuah negara dalam mengambil keputusan didasari atas kebutuhan-kebutuhan dan anggapan terhadap isu tertentu yang diyakini oleh negara tersebut. Menurut K.J. Holsti terdapat dua hal yang menjadi *core values* sebuah negara dalam melakukan kebijakan luar negerinya, yaitu keamanan dan pertahanan nasional.

Keamanan dan pertahanan nasional merupakan kepentingan yang paling dasar bagi suatu negara. Negara selalu mempertimbangkan keamanan nasionalnya sebelum mengambil sebuah kebijakan luar negeri. Keamanan nasional ini tidak hanya terdiri dari keamanan negara tersebut, namun keamanan nasional juga menyangkut tentang keamanan kebudayaan, keamanan nilai-nilai kearifan, dan keamanan yang dianut negara tersebut.

2. *Middle Range Objectives*

Middle range objectives merupakan tujuan-tujuan yang dilakukan dalam sebuah negara untuk mengambil kebijakan luar negerinya dalam ranah

¹⁹ Hans J. Morgenthau, *The American Political Science Review; The Mainsprings of American Foreign policy The National Interest Vs. Moral Abstractions*, Vol. XLIV, No. 4 (Desember 1950), University of Chicago, diakses dalam <https://canvas.harvard.edu/courses/5110/files/1090828/download?verifier=M7uRIKqJZVQ6hZpr2fc0bITECWwyNNRiF5aG8NqY&wrap=1> pada tanggal 16-4-2019 pukul 05.04 WIB.

kerjasama internasional yang dapat membangkitkan derajat perekonomian negaranya untuk mendapatkan kepentingan nasional. Keputusan negara yang menyangkut tentang *middle range objectives* biasanya sebuah tindakan penting yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian negara tersebut.

Ekonomi merupakan tujuan dasar sebuah negara untuk melakukan kebijakan luar negerinya. Bahkan faktor ekonomi biasanya lebih banyak mendorong sebuah negara untuk mengambil kebijakannya daripada faktor lain seperti politik. Sebuah negara lebih sering berusaha untuk mengambil tindakan yang memajukan ekonomi negaranya.

Pertimbangan kepentingan negara dalam skala *middle range objective* selanjutnya adalah image negara di mata negara lain. Image negara di mata negara lain dapat menjadi pertimbangan negara dalam mengambil tindakannya. Keuntungan yang didapat dari pertimbangan suatu negara untuk mengambil sebuah kebijakan luar negeri dalam hal ini adalah promosi terhadap *image* negara. Salah satu contoh tindakannya adalah melakukan sebuah promosi untuk membangun *image* negara tersebut di mata dunia.

3. *Long-Range Objectives*

Long range objective merupakan tujuan negara dalam mengambil kebijakannya untuk mencapai ideal dari sebuah negara tersebut. Idealnya sebuah negara adalah seperti keinginan suatu negara yang ingin mencapai perdamaian dunia. Kebijakan yang diambil negara untuk memenuhi

kepentingan negaranya dalam menjaga stabilitas di negaranya maupun di negara lainnya.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode eksplanatif. Metode deskriptif yaitu jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan menggunakan konsep atau teori yang berguna untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penelitian deskriptif mempunyai fokus pertanyaan “bagaimana” sehingga penulis akan menjelaskan kepentingan Indonesia dalam bekerjasama dengan Jepang dalam *Indonesia-Japan Maritime Forum* tahun 2016-2018.

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan, dan kemudian menganalisisnya, serta dengan melakukan parafrase. Literatur ini terdiri dari buku-buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, dan situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran penelitian ini.

1.7.3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data-data melalui sumber-sumber terpercaya supaya mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga menjadikan analisis ini menjadi konkrit. Adapun dalam menganalisis, permasalahan digambarkan berdasarkan data primer ataupun sekunder yang ada kemudian dianalisis, dieksplorasi dengan menggunakan konsep dan teori yang telah ditentukan.

1.7.4. Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Penelitian yang diteliti memiliki banyak arti dan makna yang luas, oleh karena itu untuk membatasi waktu yang sangat luas maka peneliti menggunakan batasan waktu yaitu tahun 2016 yang merupakan awal ditandatanganinya MoU oleh kedua negara hingga tahun 2018.

b. Batasan Materi

Penelitian memiliki batasan materi yaitu mengacu pada segala pembahasan mengenai kerjasama kedua negara di bidang maritim sesuai dengan batasan waktu penelitian yang ditetapkan dan juga tetap mengacu pada teori dan konsep yang digunakan penulis.

1.8. Hipotesa

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang adalah merupakan salah satu kebijakan Indonesia untuk mencapai visi Poros Maritim Dunia yang menjadi kepentingan nasional Indonesia. kerjasama tersebut disepakati oleh Indonesia demi meningkatkan pembangunan sector maritim yang dirasa masih jauh dari kata sempurna. Bila dilihat dari kekuatan maritim Jepang, kepentingan-kepentingan yang ingin Indonesia capai akan lebih mudah terealisasikan daripada harus berusaha sendiri dan akan meningkatkan kemajuan pembangunan yang pesat di bidang maritim Indonesia. Jepang menjadi salah satu negara maritim yang bisa dikatakan maju dalam sector maritimnya. Sehingga Indonesia bisa belajar dan melakukan kerjasama dalam pembangunan maritim yang selama ini dirasa belum mencapai maksimal dan masih banyak yang harus ditingkatkan, yang kemudian hasil akhir yang didapat dari kerjasama pembangunan maritim dengan Jepang ialah untuk bisa menjadi negara maritim yang maju seperti Jepang dan menjadi negara Poros Maritim Dunia yang menjadi visi pemerintahan Joko Widodo.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I	Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan Penelitian 1.4. Manfaat Penelitian 1.4.1. Manfaat Akademis
--------------	---

	1.4.2. Manfaat Praktis 1.5. Penelitian Terdahulu 1.5.1. Tabel Penelitian Terdahulu 1.6. Landasan Konseptual 1.6.1. Kerjasama Internasional 1.6.2. Kepentingan Nasional 1.7. Metodologi Penelitian 1.7.1. Jenis Penelitian 1.7.2. Teknik Pengumpulan Data 1.7.3. Teknik Analisa Data 1.7.4. Ruang Lingkup Penelitian 1.8. Hipotesa 1.9. Sistematika Penulisan
BAB II	Hubungan Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Pembangunan Bidang Maritim 2.1. Sejarah Hubungan Indonesia-Jepang 2.1.1. Hubungan Indonesia-Jepang Pada Masa Orde Lama-Orde Baru 2.1.2. Hubungan Indonesia-Jepang di Era Reformasi 2.2. Visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia 2.3. Kesepakatan Kerjasama Indonesia dan Jepang di Bidang Maritim 2.4. Pandangan Indonesia Menginisiasi Kerjasama dengan Jepang
BAB III	Kepentingan Indonesia Dalam Kerjasama Bidang Maritim Dengan Jepang 3.1. Kepentingan Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Bidang Maritim 3.1.1. Permasalahan Keamanan Perairan Indonesia 3.1.2. Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia dan Jepang 3.2. Kepentingan Indonesia dalam Meningkatkan Ekonomi Bidang Maritim 3.2.1. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Maritim 3.2.1.1 Pelabuhan Patimban 3.2.1.2 Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Terluar Indonesia 3.3. Kepentingan Indonesia dalam Menjaga Perdamaian Dunia Bidang Maritim 3.3.1. Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan
BAB IV	Penutup • Kesimpulan & Saran